



## Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Penentuan Isu Rancangan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar

**Muhammad Irsyad Sayuti**

Widyaiswara PPSDM Regional Makassar

Email: [tarikandata@gmail.com](mailto:tarikandata@gmail.com)

### Abstrak

*Pelatihan Dasar CPNS merupakan bagian dari masa percobaan yang bertujuan membangun karakter dan memperkuat profesionalisme yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Evaluasi rancangan aktualisasi merupakan bagian dari komponen penilaian terhadap keberhasilan belajar CPNS pada proses pelatihan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara apa adanya terkait kemampuan berpikir kritis dalam penentuan isu rancangan aktualisasi peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Makassar. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipan, studi dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis domain untuk memperoleh gambaran fungsional peran kemampuan berpikir kritis dalam proses penetapan isu rancangan aktualisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis CPNS memainkan fungsi dalam hal penggalian isu secara otonom, pemberian sudut pandang terhadap isu, dan rasionalisasi penyajian argumen yang mendukung isu yang ditetapkan dalam rancangan aktualisasi.*

**Kata Kunci :** *Berpikir Kritis, CPNS, Aktualisasi, Latsar*

### Abstract

CPNS Basic Training is part of the probationary period which aims to build character and strengthen the professionalism needed in carrying out their duties as ASN. Evaluation of the actualization design is part of the component of the assessment of the success of CPNS learning in the basic training process. This study aims to describe as it is related to critical thinking skills in determining the issue of the actualization of the Makassar Regional PPSDM CPNS basic training participants. The research was conducted using qualitative descriptive methods and data collection techniques in the form of participant observation, documentation studies, and interviews. The data obtained were then analyzed using domain analysis techniques to obtain a functional description of the role of critical thinking skills in the process of determining the actualization design issue. The results of this study indicate that the CPNS' critical thinking skills play a function in terms of autonomously exploring issues, providing perspectives on issues, and rationalizing the presentation of arguments that support the issues specified in the actualization design.

**Keywords:** *Critical Thinking, CPNS, Actualization, Latsar*

### PENDAHULUAN

Birokrasi berkelas dunia merupakan arah yang ditargetkan dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024 yang dicerminkan dengan tercapainya gagasan SMART ASN. Gagasan tersebut menonjolkan kumulatif karakteristik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, *hospitality, networking, entrepreneurship*, berwawasan global, dan penguasaan IT dan bahasa asing. Menjelang semakin dekatnya target waktu tersebut tersebut, masih terdapat faktor yang menghambat pemenuhan

pemerataan gagasan SMART ASN yang berasal dari adaptabilitas ASN maupun aspek non manusianya (Jayendra & Darma, 2022).

Kewajiban menjalani masa percobaan melalui pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan upaya membangun karakteristik dan memperkuat profesionalisme ASN dalam menggerakkan roda birokrasi menuju entitas yang berkelas dunia. Pembentukan nilai pada pribadi individu CPNS menjadi tolak ukur yang lebih dalam dari pada sekedar keberhasilan yang hanya diukur melalui fisik laporan yang dihasilkan.

Evaluasi pelatihan dasar (Latsar) CPNS untuk mengukur keberhasilannya telah dilakukan melalui berbagai pendekatan dan instrumen. Evaluasi untuk mengetahui kualitas dapat dilakukan melalui pendekatan sistem dengan memperhatikan konteks pelaksanaan, komponen input yang diberdayakan, proses pembelajaran, dan produk yang dihasilkan di akhir aktualisasi (Sumartati & Aryani, 2021). Capaian keberhasilan Latsar, dapat pula dikaji dari sisi kepuasan dan capaian hasil belajar CPNS yang diturunkan dari model evaluasi Kirkpatrick (Aulia, 2020). Pada era pandemik COVID-19, evaluasi terhadap penyelenggaraan Latsar dapat lebih teknis mengangkat hal-hal mengenai efektivitas dan kepuasan terhadap penerapan model pembelajaran non klasikal melalui *e-learning* (Affiani, 2020; Rejeki & Yuningsih, 2021).

Beberapa penelitian telah berupaya untuk membahas mengenai capaian pelaksanaan Latsar CPNS, tetapi yang mengulas dan memberikan implikasi praktis terhadap pembentukan dan pengembangan kemampuan berpikir kritis CPNS belum ada. Padahal aspek berpikir kritis merupakan pondasi bagi CPNS untuk mengaktualisasikan pembentukan nilainya melalui rancangan dan laporan aktualisasi yang dihasilkan. Berpikir kritis dibutuhkan oleh CPNS dalam memandang secara objektif fenomena atau isu yang akan diangkat dalam produk laporan yang dihasilkan. Berpikir kritis merupakan cerminan skema evaluatif yang memiliki kontribusi kuat dalam mendukung pencapaian akhir suatu intervensi (Buckley, Archibald, Hargaves, & Trochim, 2015), termasuk pengembangan pola pikir PNS dalam mendukung pelaksanaan tugas pokoknya (Kurdi, 2020). Berdasarkan pertimbangan inilah, peneliti melakukan kajian mengenai kemampuan berpikir kritis dalam penentuan isu rancangan aktualisasi peserta Latsar CPNS pada PPSDM Regional Makassar.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh data tentang fakta dan isu yang terjadi serta menggambarkannya secara apa adanya terkait kemampuan berpikir kritis dalam penentuan isu rancangan aktualisasi peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Makassar. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kemampuan berpikir kritis para CPNS PPSDM Regional Makassar semester I tahun 2022 yang bersumber pada proses penentuan isu dalam penyusunan rancangan aktualisasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Penggunaan teknik mempertimbangkan keterlibatan peneliti dalam aktivitas objek amatan. Keterlibatan dimaksud adalah peran peneliti selaku fasilitator, pembimbing, dan *coach* bagi CPNS dalam proses pembelajaran Latsar di PPSDM Regional Makassar. Disamping itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen terkait dan wawancara dengan informan yang dapat memperkaya informasi terhadap proses yang diamati.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis domain. Teknik ini seiring dengan pemilihan metode deskriptif yang akan disajikan secara kualitatif berupa gambaran umum mengenai objek

yang diteliti. Lebih dalam, penelitian ini berupaya mencari hubungan fungsional kemampuan berpikir kritis CPNS untuk menetapkan isu dalam rancangan aktualisasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penentuan Isu Dalam Penyusunan Rancangan Aktualisasi Peserta Latsar CPNS

Pada semester pertama tahun 2022, pada realisasi rencana kerja anggaran PPSDM Regional Makassar, Latsar CPNS diselenggarakan sebanyak tiga angkatan. Proses evaluasi pelaksanaan Latsar CPNS terdiri atas tiga bagian besar, yakni evaluasi peserta, evaluasi tenaga pelatihan, dan evaluasi penyelenggaraan. Penilaian terhadap capaian pembentukan karakter CPNS diperoleh melalui evaluasi peserta, sedangkan dua evaluasi lainnya untuk menilai peranan aspek yang mendukung pencapaian pembentukan karakter CPNS tersebut.

Ada empat aspek yang dinilai dalam kerangka evaluasi peserta. Pertama, aspek sikap perilaku memiliki bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen). Kedua, aspek akademik memiliki bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen). Ketiga, aspek aktualisasi memiliki bobot penilaian sebesar 50% (lima puluh persen). Terakhir, aspek penguatan kompetensi teknis bidang tugas memiliki bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen). Dari proporsi tersebut, aspek aktualisasi memiliki bobot paling besar karena memuat komponen penyusunan rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi. Aspek aktualisasi ini merupakan produk yang dihasilkan oleh CPNS yang mencerminkan kumulatif capaian kompetensi yang diharapkan dari pelaksanaan Latsar.

Dalam aspek aktualisasi, penelitian ini berfokus pada tahapan penyusunan rancangan aktualisasi karena penggunaan proses berpikir kritis sangat diperlukan untuk memandang permasalahan yang diangkat secara objektif. Ada lima indikator penilaian dalam evaluasi rancangan aktualisasi, yakni ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan Agenda 3 (kedudukan dan peran PNS menuju SMART ASN), gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan, tahapan rencana kegiatan aktualisasi, relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi Agenda 2 (nilai-nilai dasar PNS), dan teknik komunikasi. Pada setiap indikator dikembangkan lagi menjadi empat level penilaian yang menandakan kualitas dari rancangan aktualisasi yang dibuat dalam indikator yang dinilai.

Dari keempat indikator penilaian rancangan aktualisasi, proses berpikir kritis untuk pertama kali berperan dalam indikator pertama, yakni ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan Agenda 3. Indikator tersebut berkaitan dengan penetapan isu yang akan menjadi topik pembahasan dalam rancangan aktualisasi dan pelaksanaannya. Isu merupakan hal pertama yang perlu dipastikan dan berpikir kritis merupakan mesin yang bekerja untuk hal tersebut. Empat level penilaian dalam indikator ini (mulai dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi), yakni (1) isu yang diangkat tidak dapat dikategorikan sebagai isu; (2) isu yang diangkat tidak aktual; (3) isu yang diangkat aktual, namun tidak disertai dengan analisis dan bukti yang dikaitkan dengan Agenda 3; (4) isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3.

Proses penetapan isu dalam rancangan aktualisasi diproduksi melalui proses analisis isu menggunakan instrumen analisis tertentu. Sepanjang pengamatan peneliti dan pengalaman dalam membimbing dan melakukan *coaching* proses aktualisasi peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Makassar tahun 2022, para CPNS menggunakan instrumen analisis USG. USG merupakan alat bantu untuk melakukan tapisan isu menggunakan kriteria USG hingga mengekrucut menjadi satu isu terpilih. USG merupakan singkatan dari *Urgency*,

*Seriousness*, dan *Growthness*. *Urgency* merupakan kriteria untuk menentukan isu prioritas dari aspek seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. *Seriousness* digunakan untuk memprioritaskan isu dari aspek akibat yang akan ditimbulkan. *Growth* merupakan kriteria untuk memprioritaskan isu pada aspek kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Pada setiap pengusulan rancangan aktualisasi, para CPNS mengajukan minimal tiga isu ke dalam tabel USG yang selanjutnya berdasarkan penilaian bobot setiap kriteria, isu yang memiliki nilai prioritas yang ditetapkan menjadi permasalahan dalam rancangan aktualisasi.

No	Isu	Bobot USG			Jumlah	Prioritas
		Urgent (U)	Seriousness (S)	Growth (G)		
1	Kurang efektif dan efisien konsultasi pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pengguna layanan di bidang pembinaan ASN dan sekretariat korpri	3	3	3	9	I
2	Kurang optimalnya penataan arsip keluar dan masuk di bidang pembinaan ASN dan sekretariat korpri	1	2	2	5	II
3	Kurangnya hubungan koordinasi dalam hal mekanisme kerja pegawai antar bidang	2	1	1	4	III

Keterangan :

- 3 : Tinggi
- 2 : Sedang
- 1 : Rendah

**GAMBAR 1.** Contoh tabel USG CPNS PPSDM Regional Makassar (2022)

## 2. Identifikasi Kemampuan Berpikir Kritis CPNS Dalam Penetapan Isu Rancangan Aktualisasi

Muatan materi mengenai berpikir kritis dalam Latsar CPNS telah disinggung dalam proses pembelajaran sebelum penyusunan rancangan aktualisasi oleh peserta CPNS. Peletakan materi pada modul adaptif dalam agenda pembelajaran nilai-nilai dasar ASN menyiratkan makna bahwa CPNS dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis. Dalam modul tersebut, berpikir kritis diilustrasikan sebagai kemampuan untuk memandang fenomena secara objektif. Dalam kaitannya dengan penyusunan rancangan aktualisasi, objektifitas dalam memandang isu yang akan ditetapkan sebagai permasalahan merupakan proses yang dipastikan melalui berpikir kritis. Adapun identifikasi kemampuan berpikir kritis CPNS dalam penetapan isu tersebut tercermin dalam beberapa kemampuan dasar berikut.

### 1. Otonom dalam menggali isu

Setidaknya, terdapat dua kesempatan dalam proses Latsar yang dapat menunjukkan adanya dorongan dari diri sendiri CPNS untuk menemukan dan menggali isu yang mereka amati di tempat kerjanya sebagai cerminan aktifnya proses berpikir kritis. Kesempatan pertama saat proses pembelajaran agenda 3. Muatan materi yang disajikan pada proses tersebut memberikan sudut pandang bagi CPNS untuk mengidentifikasi

proses atau peristiwa yang ditemukan ditempat kerja. CPNS dengan perbendaharaan pengalaman mengenai peristiwa di tempat kerjanya adakalanya menggunakan kesempatan berbicara pada proses pembelajaran agenda 3 dalam bentuk pertanyaan sebagai upaya klarifikasi peristiwa terhadap kriteria baru yang dipelajarinya.

Mengajukan pertanyaan merupakan perangkat dari berpikir kritis (Cojocariu & Butnaru, 2014). CPNS yang menginisiasi pertanyaan tanpa sebelumnya mendapatkan stimulus dari fasilitator yang memintanya bertanya, memperlihatkan adanya konstruksi pertanyaan yang tidak lagi sekedar menginterpretasikan kriteria untuk mencari fenomena yang sesuai, tetapi minimal mengajukan pertanyaan yang sifatnya analisis (menemukan penyebab terjadinya peristiwa) bahkan evaluatif (mencari nilai dari sebuah peristiwa).

Kesempatan kedua saat penyusunan dokumen analisis isu melalui tabel USG. Cerminan proses berpikir kritis terlihat pada pengambilan keputusan yang berasal dari diri sendiri, bukan karena faktor luar dirinya (Sihotang & K, 2012). Berdasarkan pengamatan peneliti, CPNS yang mampu menunjukkan perilaku otonom dalam menyelesaikan tabel USG cenderung lebih efisien dalam waktu penyelesaian dibandingkan CPNS yang menunjukkan sikap dominan menunggu arahan dari pihak eksternal dirinya seperti *coach* atau pembimbing. Bahkan, tidak jarang untuk CPNS yang lamban menginisiasi penyelesaian tabel USG, peneliti menemukan perilaku CPNS yang menyalin tabel USG milik orang lain hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Temuan serupa juga peneliti amati dari proses penyelesaian tabel USG untuk *coach* lainnya dalam menghadapi CPNS yang menjadi *coachee*-nya, sebagaimana kutipan wawancara dengan informan inisial AS, fasilitator dan coach Latsar CPNS PPSDM Regional Makassar, dibawah ini,

*“Tidak semua peserta Latsar CPNS dalam proses penetapan isu menunjukkan antusias dan kemampuan yang sama dalam menentukan isu rancangannya. Beberapa di antara mereka ada yang aktif berkomunikasi dengan saya, baik lewat WA atau tatap muka, terkait isu yang ingin dipilih setelah berkomunikasi dengan mentor. Ada juga, yang seolah-olah tidak mampu lagi berpikir dan merasa sulit menentukan isunya, jangankan menentukan isu, menjelaskan redaksi kalimat isunya saja masih terbata-bata.” (2022)*

## 2. Mengambil sudut pandang dalam membahas isu

Berikut disajikan dokumentasi rancangan aktualisasi dari dua CPNS PPSDM Regional Makassar dalam menyajikan deskripsi isu yang diajukan untuk diangkat sebagai permasalahan.

1. Kurang efektif dan efisien konsultasi pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pengguna layanan di bidang pembinaan Asn dan sekretariat korpri, hal ini disebabkan oleh :
  - Tidak terjadwalnya konsultasi pelayanan antara pengguna layanan dan penyedia layanan
  - Pemberi layanan sedang tidak berada ditempat atau sedang tugas luar.
  - Konsultasi pelayanan hanya melalui via chat WA atau telepon
  - Konsultasi pelayanan hanya dilakukan oleh pengelola kepegawaian

(a)

1 Tingkat Kedisiplinan Pegawai dalam menjalankan Tugas.  
Pelayanan Di kelurahan juga Mendapatkan Kendala akibat tingkat kedisiplinan dari sebagian pegawai kelurahan dalam melaksanakan tugas.

(b)

**GAMBAR 2.** Contoh penyajian deskripsi isu dari dua CPNS PPSDM Regional Makassar (2022)

Sudut pandang dalam membahas isu merupakan bagian dari kemampuan dasar berpikir kritis (Sihotang & K, 2012). Tanpa posisi yang jelas dan tepat, maka sebuah isu tidak dapat didiskusikan. Sudut pandang terhadap sebuah isu merupakan pilihan dari dikotomi mendukung atau menentang keberadaan isu tersebut. Melalui sudut pandang itu pula konstruksi pemaknaan dan penyelesaian isu memiliki arah yang jelas.

Gambar 2 (a) merupakan contoh deskripsi isu yang memiliki sudut pandang dalam penyajiannya. CPNS pemilik tulisan tersebut telah mengambil posisi untuk menyatakan isu sebagai sebuah masalah dengan berbagai gejalanya. Pernyataan tegas CPNS dalam menilai isu sebagai hal yang *'kurang efektif dan efisien'* telah mencerminkan posisi CPNS dalam memandang isu. Posisi CPNS tersebut pada akhirnya memudahkan dalam melakukan konstruksi makna dan penyelesaian terhadap isu.

Gambar 2 (b) merupakan contoh deskripsi isu dengan sudut pandang yang bimbang. CPNS pemilik tulisan tersebut hanya mengungkapkan terjadinya kendala terhadap pelayanan, tetapi ragu mengungkapkan penyebab kendala tersebut sebagai akibat kondisi tingkat tertentu dari kedisiplinan pegawai. Ketidakjelasan dalam penilaian isu akan mengaburkan pembahasan terkait isu dan penyelesaiannya.

**3. Penyajian argumen secara rasional**

Berpikir kritis dicerminkan oleh adanya argument yang rasional dan jelas. Bahkan keberadaan argumen dan penalaran yang jelas merupakan esensi dari berpikir kritis (Cojocariu & Butnaru, 2014), yang dibutuhkan dalam penyajian isu. Isu perlu disajikan dengan argumen berupa pernyataan atau proposisi yang didukung oleh bukti yang relevan.

a. Rendahnya Hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PPKn  
Dalam mata pelajaran PPKn terutama Siswa kelas VII sering kali memperoleh nilai di bawah KKM, hal ini dapat dilihat melalui perilaku peserta didik saat belajar yaitu, keluar masuk kelas, cepat bosan, kurang konsentrasi, jarang hadir, tidak kerja tugas, tidur hal ini berdampak pada kurangnya minat dan motivasi siswa kesulitan belajar hal ini berdampak juga pada rendahnya hasil belajar peserta didik yang terjadi secara terus menerus tidak terjadi peningkatan, yang disebabkan oleh tidak bervariatifnya media pembelajaran Peserta didik bisa meningkatkan hasil belajar PPKn dengan cara guru menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik sehingga bisa termotivasi dan memusatkan perhatian dengan cara menggunakan media pembelajaran yang menggerakkan peserta didik untuk mencari tahu atau menemukan informasi sendiri sehingga pembelajaran dikelas tidak monoton tetapi lebih mengikutsertakan peserta didik didalam pembelajaran agar peserta didik bisa fokus, dan lebih tertarik/termotivasi untuk belajar PPKn sehingga hal ini bisa membantu peserta didik meningkatkan hasil belajarnya. Upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan kompetensi dengan guru mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kemampuan mengajar tetapi belum pernah di terapkan di sekolah.

**GAMBAR 3.** Contoh penyajian deskripsi isu oleh CPNS PPSDM Regional Makassar (2022)

Pada Gambar 3 disajikan contoh deskripsi isu yang dibuat oleh CPNS PPSDM Regional Makassar. Klaim CPNS terhadap isu yang disajikannya telah menunjukkan posisi sudut pandang terhadap isu tersebut. Namun, argumen yang disajikan masih belum meyakinkan dalam menguatkan posisi terhadap isu. Isu terkait rendahnya hasil belajar perlu didukung oleh argumen yang menyajikan data terkait capaian hasil belajar tersebut. Pada contoh di Gambar 3, argumen yang disajikan oleh CPNS tersebut masih mengandung bagian

yang belum menguatkan isu yang diambil. Klausul ‘...dapat dilihat melalui perilaku peserta didik saat belajar, yaitu keluar masuk kelas, cepat bosan, kurang konsentrasi, jarang hadir...’ merupakan sajian argumen yang belum rasional mendukung isu. Hasil belajar membutuhkan dukungan argumen berupa penilaian atas capaian belajar peserta didik, bukan perilaku yang ditunjukkan saat proses pembelajaran. Perilaku pada proses pembelajaran lebih tepat menjadi unsur sebab terjadinya isu dari pada deskripsi yang menggambarkan gejala dari isu yang dibahas.

Bagian lain yang juga mencerminkan proses penalaran yang rasional dalam penetapan isu oleh CPNS adalah proses pembobotan nilai untuk kriteria USG pada setiap isu. Berdasarkan pengamatan dalam melakukan pembimbingan penyusunan rancangan aktualisasi, peneliti menemukan subjektivitas yang tinggi dalam pemberian bobotnya. Penilaian terhadap kriteria *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growthness* dari sebuah isu belum didukung oleh kerangka objektif yang jelas. Satu-satunya argumen CPNS dalam membangun keyakinannya pada pemberian bobot pada kriteria USG adalah hasil koordinasi dengan mentor atau pimpinan unit kerja asal instansi CPNS bekerja. Hal ini juga terjadi pada proses pembimbingan penyusunan rancangan aktualisasi CPNS oleh *coach* atau pembimbing lainnya di PPSDM Regional Makassar sebagaimana diungkapkan oleh informan insial AI, bahwa “*kalau isu sudah disepakati antara peserta CPNS dengan mentornya yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan, kita sebagai coach hanya perlu memberikan dukungan metodologi lebih lanjut karena yang tahu masalah sebenarnya di lapangan adalah mentornya*” (2022).

## SIMPULAN

Proses berpikir kritis dalam penetapan isu dalam penyusunan rancangan aktualisasi mencerminkan adanya cara pandang objektif CPNS terhadap isu yang diamati dan diangkat sebagai permasalahan. Kemampuan berpikir kritis CPNS PPSDM Regional Makassar dalam penetapan isu tertuang dalam dokumen analisis isu yang di dalamnya terdapat instrumen tabel USG. Pada proses penyelesaian tabel USG ini menggambarkan kemampuan berpikir kritis CPNS memainkan fungsi dalam hal penggalian isu secara otonom, pemberian sudut pandang terhadap isu, dan rasionalisasi penyajian argumen yang mendukung isu.

Pada proses penetapan isu, khususnya pada penyusunan tabel USG diperlukan kerangka kerja lebih lanjut untuk memberi keyakinan bahwa penilaian terhadap isu berlangsung secara objektif. Dalam hal ini, peneliti memberikan saran perlunya CPNS membuat lembar kerja tambahan yang berisikan catatan atau daftar pertanyaan beserta jawabannya yang menjadi dasar pemberian bobot nilai pada setiap kriteria USG.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affiani, M. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan III Angkatan III Berbasis E-Learning Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 104-109.
- Aulia, R. (2020). Penerapan Model Evaluasi Kirkpatrick Pada Pelatihan Dasar CPNS Calon Hakim MA Pada Mata Pelatihan ANEKA Di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 23-32.
- Buckley, J., Archibald, T., Hargaves, M., & Trochim, W. M. (2015). Defining and Teaching Evaluative Thinking: Insights From Research on Critical Thinking. *American Journal of Evaluation*, 1-14. doi:DOI: 10.1177/1098214015581706
- Cojocariu, V.-M., & Butnaru, C. E. (2014). Asking questions - critical thinking tools. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 128, 22-28.

- Jayendra, A. A., & Darma, G. S. (2022, Februari). Disruption of ASN Behavior in Bali: Challenges and Obstacles. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5, 5518-5527. doi:<https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4257>
- Kurdi, M. (2020). Mengembangkan Pola Pikir PNS sebagai Pelayan Publik. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 36-42.
- Rejeki, P. W., & Yuningsih, Y. (2021). Kompetensi Peserta Pelatihan Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Latsar CPNS. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-36.
- Sihotang, K., & K, R. F. (2012). Berpikir Kritis. In K. Sihotang, R. F. K, B. Molan, A. A. Ujan, & R. Ristiyantoro, *Critical Thinking: Membangun Pemikiran Logis* (pp. 1-29). Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Sumartati, L., & Aryani, A. (2021, Juni). Evaluasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Agama Tahun 2019 Dengan Model CIPP. *Jurnal Perspektif*, 14, 59-77.